

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum terjadinya Perang Dunia II, China telah mengalami kemajuan dalam pemerintahan yang tidak lagi berwujud sebagai kekaisaran melainkan berevolusi menjadi Republik Rakyat Cina yang dikenal sebagai RRC, perubahan ini terjadi pada tahun 1911.

Pasca Perang Dunia II tahun 1945, dunia berada di antara dua sistem yang sama sekali berbeda dalam hubungan internasional, pertama sistem teritorial yang menekankan pada penguasaan wilayah. Kedua Sistem Oceanic atau perdagangan sebagai warisan kebijaksanaan Inggris tahun 1850-an.

Dengan sistem teritorial yang menilai kekuasaan berdasarkan dari luas wilayah yang dimiliki semakin luas wilayah, semakin besar kekuasaan. Secara teoritis, Negara besar ingin mempunyai wilayah yang cukup luas sehingga mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada Negara lain, mereka bermaksud menguasai sumber-sumber alam, bahan mentah dan daerah pasar agar mencapai kondisi swasembada dan swadaya. Sebaliknya, sistem Oceanic atau perdagangan berpandangan bahwa kondisi swasembada dapat dicapai melalui perdagangan bebas dan terbuka.

Sistem Oceanic atau perdagangan, pertama bermula pada tahun 1975 pada saat Amerika Serikat keluar dari Vietnam dengan adanya doktrin Nixon yang

memaksa Negara-negara Asia untuk mengurus keamanannya sendiri. Sampai pada pertengahan 1980an AS dan banyak Negara industri maju lain mengalami kemerosotan ekonomi berkepanjangan. Dua peristiwa ini tercermin dalam perubahan kebijakan Negara-negara industri maju dalam memberi bantuan. Seiring bergesernya waktu sistem geopolitik dan geoekonomi semakin tegas dengan negara-negara maju baik secara bilateral maupun multilateral dimana peran pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya ekonomi dengan cara meliberalisasikan pasar.

Perubahan geopolitik dan geoekonomi yang mendasar dari perubahan situasi internasional pasca Perang Dingin membuat China membuka diri dalam perekonomian dan modernisasi negaranya melalui kerjasama dengan AS. Kerjasama AS diperlukan China sebagai peluang investasi asing, sebagai pangsapasar dari produk China, dan membangun pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Berakhirnya Perang Dingin membuka peluang yang lebih besar bagi perluasan dan peningkatan peran negara-negara besar. Perluasan dan peningkatan dengan sendirinya mengubah tatanan kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Munculnya China sebagai negara besar Asia merupakan bentuk kekuatan dominan menggantikan AS dan Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik.

Hubungan kerjasama China dan AS merupakan suatu proses transisi kekuatan suatu Negara yang awalnya menggunakan kekuatan politik dan militer untuk mencapai tujuan kepentingan nasional suatu Negara berganti menjadi

kekuatan geoekonomi yang didominasi oleh kekuatan China dan AS melalui hubungan kerjasama di bidang ekonomi.

Hubungan kerjasama ini tidak lepas dari politik luar negeri AS pada masa perang dingin melihat komunisme sebagai ancaman utama di masa Reagan dan Bush, kedua pemimpin tersebut kurang menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan China disebabkan defisit perdagangan AS pada tahun 1980 dari US\$74 miliar melonjak menjadi US\$221 miliar, pada tahun 1987 akhirnya turun menjadi US\$150 miliar karena partai Demokrat dan partai Republik di kongres menolak untuk mengurangi belanja pemerintah serta adanya pelanggaran HAM yang dilakukan China pada krisis selat Taiwan pada peristiwa Tiananmen 1989.

Pada tahun 1990-2000 China menjadi negara penggerak pertumbuhan ekonomi dunia dari segi penguasaan pasar dan ekspor kemudian disusul oleh AS dan Jepang. Rasio export China terhadap AS pada tahun 2001 adalah 20% dari jumlah ekspor AS, dan ekspor dari China terhadap Jepang pada tahun yang sama adalah 18% dari jumlah ekspor Jepang. Hal ini menunjukkan kekuatan pasar China yang mendominasi dari Negara-negara besar.

Munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari peran pemimpin yang dituangkan dalam kebijakan politik dan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Deng Xiou Ping telah membawa China dalam perubahan ekonomi dalam mencanangkan reformasi ekonomi di segala bidang dan dikenal sebagai ekonomi pasar sosialis China serta direalisasikan dengan Pembentukan Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone atau SEZs). China

dengan kekuatan perekonomiannya mampu membawa ekspansi pasar pada negara-negara Asia dan menimbulkan rasa kekhawatiran AS dan Negara-negara maju maupun negara berkembang lainnya. Ekspansi ini telah membuka peluang pasar global bagi negara-negara maju dan berkembang agar dapat bersaing di era globalisasi.

Pada percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi. Dalam suatu era globalisasi, perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan karena diharapkan membawa perubahan penting bagi tatanan perdagangan dunia.

Salah satu perjanjian perdagangan regional saat ini adalah *Asean Free Trade Area (AFTA)* yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sebuah organisasi regional Negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan strategis AFTA untuk meningkatkan keunggulan komparatif regional *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sebagai suatu kesatuan unit produksi dan mampu memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi Negara-negara yang berasal dari ASEAN.¹

¹ Prabowo Diiby, W. S., *AFTA Suatu Pengantar*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Adapun hubungan China dengan ASEAN tidak luput pula dari kecurigaan satu dengan lainnya. China menganggap kehadiran ASEAN dalam politik regional di dekade 60-an sebagai bentuk ancaman barat terhadap China. Anggota ASEAN pada dasarnya merupakan anggota dari organisasi kemandirian regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh AS dan Inggris (*Collective Defence Treaty, SEATO, Five Power Defence Arrangement*). Disamping itu, Negara-negara ASEAN mencurigai China sebagai induk dari gerakan komunisme di Asia Tenggara. Alasan agama merupakan penghalang hubungan China dengan ASEAN pada awalnya melihat mayoritas agama di kawasan Asia Tenggara adalah Muslim dan Kristen sementara China adalah komunis ateis.²

Titik awal perubahan hubungan ASEAN dengan China setelah Deng Xiou Ping melancarkan reformasi politik ekonomi. Di mulai dari akhir dekade 70-an Deng membuat China terbuka dengan dunia luar dan memulai membuka pintu investasi asing. Pendekatan China terhadap ASEAN di mulai dengan mengurangi dukungan China terhadap gerakan komunis di Negara-negara ASEAN. Upaya demi upaya berhasil China wujudkan agar mendapatkan perhatian dari ASEAN hingga puncaknya pada Juli 1991 Menteri Luar Negeri China Qian Qichen menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting ke-24. China memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan niatnya agar dapat berkerjasama dengan ASEAN yang ditanggapi positif oleh ASEAN dengan memberikan status Mitra Konsultasi kepada China. Buah hasil dari pendekatan China ini segera

² Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 69.

dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan ASEAN. Tahun 1994 China diterima ASEAN dalam pertemuan ASEAN *Regional Forum* dengan mempertimbangkan posisi strategis dan potensi pasar China yang sedemikian besar. Berselang tiga tahun kedepan China mulai terlibat dalam pertemuan ASEAN+3 pada 1997, pertemuan ini sangat diharapkan oleh China melihat proses pendekatan China dengan ASEAN semakin terbangun. ACFTA pertama kali di inisiasi oleh China pada November tahun 2000. Dasar dari inisiasi ACFTA adalah dengan penandatanganan ASEAN- China *Comprehensive Economic Cooperation* pada November 2001 di Brunei Darussalam, sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA. Puncak pertemuan ASEAN dengan China akhirnya berlangsung dalam Pertemuan Puncak ASEAN tahun 2003. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and China*. Kesepakatan tersebut merupakan langkah awal persiapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China *Free Trade Area*.³

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-CHINA *Free Trade Area* (ACFTA) yang merupakan titik awal proses terbentuknya perdagangan bebas antar China dan Negara-negara ASEAN. Secara formal ACFTA pertama kali di luncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Amandemen pertama kali ini di fokuskan kepada perdagangan bebas di Vietnam, agar Vietnam

³ Ibid., hal. 170-173

menurunkan tarif dan menempatkan amandemen tersebut sebagai panduan perdagangan internasional mereka.

Fase awal dari kesepakatan yang dikenal dengan Program Panel Awal EHP (*Early Harvest Programme*) ACFTA yang berlaku pada 1 Januari 2004 dan pada tanggal 1 Januari 2010 di berlakukan kepada 6 Negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini merupakan langkah awal perdagangan bebas untuk saling meningkatkan pasar ekonomi global dan saling meningkatkan GDP ASEAN dan China untuk masa mendatang.⁴

Secara fakta China merupakan sebuah kekuatan ekonomi besar yang telah bangkit bersamaan dengan lajunya arus globalisasi dan liberalisasi. Namun, pada saat China telah berhasil menguatkan dan menjaga stabilitas negara dalam bidang perekonomian, China masih melakukan inisiasi atas kerjasama perdagangan bebas terhadap ASEAN dengan dibentuk kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Dalam hal kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dengan China merupakan hal yang patut diperhatikan.

⁴ N. S. Sumaryadi, *Global Trade liberalization: its Impact on the Export Competitiveness of China and Asean 5 in the United States Market*, Gajah Mada International Journal of Business III(2), Yogyakarta, 2001.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa pemerintah China berupaya meningkatkan perekonomian dengan membentuk kerjasama ASEAN China *Free Trade Area* (ACFTA)?”.

C. Landasan Teori

1. Teori Absolute Advantage

Dalam penulisan proposal skripsi ini teori yang digunakan adalah teori ekonomi klasik. Adam Smith berpendapat dengan teori *Absolute Advantage* bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Kekayaan suatu Negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Suatu Negara mengekspor barang tertentu karena Negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada Negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak merupakan kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan Negara-Negara lain.

Teori *Absolute Advantage* lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan teori murni (*pure theory*)

perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut.⁵

Menurut Gilpin, teori *Absolute Advantage* atau keunggulan komperatif adalah dengan penghapusan tarif barang akan memungkinkan terjadinya spesialisasi secara nasional dan pemanfaatan secara optimal atas faktor-faktor produksi dunia. Pada gilirannya akan memungkinkan pola perdagangan internasional ditentukan oleh keuntungan komperatif, yaitu oleh harga. Prinsip keuntungan komperatif memastikan sebuah negara akan meraih efisiensi ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar melalui partisipasi perdagangan internasional, tidak melalui proteksionisme perdagangan.⁶

Berdasarkan teori Adam Smith tersebut dapat diaplikasikan bahwasanya posisi keunggulan China saat ini merupakan Negara yang memiliki populasi penduduk nomor satu terbesar di dunia dengan populasi sebesar 1,35 miliar jiwa. Sumber daya manusia yang besar dan didukung dengan sumber daya alam yang berlimpah menjadikan China mampu menciptakan *relative cost* dalam spesialisasi berbagai jenis barang. Keadaan China yang mampu menghasilkan berbagai jenis

⁵ D. Winich, *Adam Smith's Politics: An Essay in Historiographic Revision*, Cambridge University Press, 1978.

⁶ Budi Winarno, 2009, "Pertarungan Negara VS Pasar", Media Pressindo, Bab.3, hal.87, https://books.google.co.id/books?id=KHm6MYODyeoC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=Neoliberalisme+yogyakarta+2003&source=bl&ots=e9YU3HqdEc&sig=RhKF9HgeqXG7f0Xg3NO36qOu7OI&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Neoliberalisme%20yogyakarta%202003&f=false, diakses 24 November 2015.

barang dengan kos yang secara absolut lebih rendah dari negara lain menjadikan China mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka dari itu China menginisiasi kerjasama perdagangan bebas kepada Negara-negara anggota ASEAN yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda-beda, dengan adanya interaksi ekspor dan impor dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas pada suatu negara.

2. Konsep Hegemoni

Konsep hegemoni Gramsci yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, hegemoni dalam Bahasa Yunani kuno disebut 'eugonomia' sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi atas Negara-negara kota secara individual. Menurut Gramsci, kelas social akan memperoleh keuntungan melalui dua cara yaitu, pertama, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara dominasi (dominio) atau paksaan (coercion) dengan secara konsensual. Kedua, melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Gramsci menggunakan centaur mitologi yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari 'perspektif ganda' suatu tindakan politik kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Gramsci menganggap langkah-langkah pragmatis tersebut

dibutuhkan oleh tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan, ia juga memiliki kepedulian etis yang sangat mendalam terhadap cara berjalannya proses tersebut.⁷

Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah harus menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut menjadi dominan ketika ia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus “memimpin” juga.⁸

Manifestasi dalam cara kepemimpinan moral dan intelektual manjadi landasan dasar dari hegemoni. Konsep hegemoni sangat terkait dengan kontrol sosial suatu kelas atau kelompok tertentu terhadap kelas yang lain, terutama kelas yang berada pada tingkatan bawah (*subaltern*). Kontrol sosial memiliki bentuk secara internal melalui pembentukan keyakinan-keyakinan personal menjadi sebuah bentuk norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, hegemoni merupakan sebuah bentuk khusus dari relasi kekuasaan sosial di mana kelompok-kelompok yang dominan mengamankan posisi istimewa mereka sebagian besar melalui cara-cara yang bersifat konsensual terkait dengan persetujuan.⁹

⁷ Nezar Patria dan Andie Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1999, hal. 118-119

⁸ *Ibid.*, hal. 117-118

⁹ Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, MantraPress, Bekasi, 2011, hal. 167-168.

Menurut Roger Simon, bagi Lenin konsep hegemoni adalah bagian dari strategi revolusi, sebuah strategi di mana kelas pekerja dan yang merepresentasikannya harus mengambil dukungan dari mayoritas yang besar, namun dalam pemikiran Lenin, kerjasama ini haruslah bersifat temporer, demi menjaga keamanan (*securing*) kepentingan kelas buruh. Jadi, secara umum Lenin melihat hegemoni sebagai kepemimpinan politik kelas buruh dalam aliansi kelas-kelas yang lebih luas.¹⁰

Gramsci menambahkan dimensi-dimensi baru atas konsep hegemoni dengan memperluas konsep tersebut sambil juga memasukkan praktik-praktik kelas kapitalis atau yang merepresentasikannya, untuk mengambil kekuasaan atas negara, kemudian mempertahankan dan memelihara kekuasaan tersebut setelah berhasil diperoleh.

Lebih jauh lagi, Roger Simon menulis bahwa poin awal konsep hegemoni adalah bahwa sebuah kelas merepresentasikan dan menjalankan kekuasaan atas kelas-kelas yang ter subordinasi melalui kombinasi cara-cara kekerasan (*coercion*) dan persuasif (*persuasion*). Pada titik ini, hegemoni adalah sebuah hubungan, yang bukan melalui cara dominasi lewat cara-cara kekerasan, tetapi terbentuk atas dasar persetujuan suatu cara-cara kepemimpinan politik dan ideologis. Intinya bagaimana mengorganisir kesepakatan atau persetujuan bersama.¹¹

¹⁰ Daniel Hutagalung, *Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi*, Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia, 74:12 (Jakarta, Desember 2004) hal. 9.

¹¹ Ibid.

Berdasarkan konsep hegemoni Gramsci, kekuatan besar China yang semakin meluas dengan upaya kerjasama ekonomi, hal tersebut merupakan strategi China melebarkan kekuasaannya di kawasan Asia Tenggara, kerjasama ekonomi ACFTA yang telah di bangun merupakan suatu sarana upaya agar China dapat mencapai hegemoni kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Bagian-bagian yang tidak lepas dari strategi kekuasaan China adalah *Tributary System* yang telah di terapkan China pada masa imperial Qing dan Ming. Dan bahwa hegemoni sosial dan politik pada akhirnya mengarah pada hegemoni penguasaan ekonomi atas kawasan di Asia Tenggara.

3. Konsep Sphere of Influence

Konsep *sphere of influence* secara umum terkait dengan tradisi geopolitik, yang mana mempelajari hubungan antara daerah teritorial dan politik. Geopolitik terlihat sebagai bentuk motivasi politik dan merupakan sebuah alat untuk mencapai kekuatan.¹²

Tindakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain, yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan. Tindakan juga dapat dianggap sebagai isyarat yang dikirimkan oleh

¹² Susanna Hast, *Spheres of Influence in International Relations*, Routledge, 2014. hal. 78. https://books.google.co.id/books?id=fZjeCwAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=sphere+of+influence+morgenthau&source=bl&ots=mMWNpBVoi5&sig=2JgtTOadPW-6qOj8JACBZ56Oi3I&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sphere%20of%20influence%20morgenthau&f=false, diakses 20 Mei 2016, jam 03.00.

seorang aktor untuk mempengaruhi pandangan si penerima mengenai si pengirim. Atau dengan kata lain, politik luar negeri selalu diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan nasional. Politik semacam ini selalu berusaha manfaat maksimal dalam konstelasi politik internasional.

Tujuan optimal Politik Luar Negeri adalah mengarah kepada faktor external, yaitu upaya realisasi dari kepentingan nasional yang dilegitimasi ke dalam lingkup internasional. Di dalam Negara-negara maju untuk diartikan sebagai Negara yang memiliki kemampuan yang unggul. Tujuan ini diarahkan untuk mempercepat terealisasinya tujuan tersebut. Terutama sebagai akibat adanya aksi, kekuatan, kemampuan dan pengaruh yang berfungsi sebagai komponen-komponen untuk menunjang tujuan utama yang bersifat kontemporer dari politik luar negeri. Konsekuensi logis dari adanya kemampuan yang dimiliki negeri tersebut.

Jack C. Plano, mengartikan *influence* (pengaruh), sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku aktor lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil, dapat menyebabkan perubahan-perubahan atau mencegah perubahan yang tidak diinginkan pada kecenderungan pendapat, sikap, dan keyakinan atau pada tingkah laku lain yang dapat terlihat.¹³

Kemampuan pelaku mempengaruhi aktor lain, tergantung pada banyak faktor. Diantaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat

¹³ Jack C. Plano & Robert E. Riggs. *Kamus Analisa Politik*, CV Rajawali, Jakarta 1990, hal 112

pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atau dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh, dan derajat tuntutan penyesuaian kemampuan maksimum pelaku/aktor untuk mengubah tingkah laku aktor lain jarang digunakan. Karena biaya politik bagi sebuah aktor atau penyebab lainnya mungkin akan mengakibatkan pencurahan daya politik aktor tadi.

Jack C. Plano juga memperjelas dimana ada sebuah wilayah yang didominasi oleh kepentingan nasional dari sebuah kekuatan tertentu. Dalam sebuah kawasan pengaruh (*sphere of influence*) kekuatan besar tersebut memang tidak mempunyai kekuatan Formal atas Negara-negara yang ada di dalam wilayah pengaruhnya. Tetapi aktor besar tersebut dalam kenyataannya mampu memaksa pihak lain untuk menerima sebuah ketaatan tingkah laku politik sesuai dengan kepentingan negara besar tersebut.

Aplikasi dalam konsep *sphere of influence*, bahwa kekuasaan China yang telah lama tumbuh mengakar di kawasan Asia Tenggara merupakan bentuk dominasi China atas wilayah tersebut. Adanya *tributary system* dimana negara-negara dibawah kekuasaan China harus tunduk, sistem tersebut menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara yang dahulu merupakan kawasan yang terkait dalam pengaruh *tributary system* milik China.

D. Hipotesa

Dengan memahami latar belakang dan landasan teori di atas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

Ada dua alasan pemerintah China berupaya meningkatkan perekonomian dengan membentuk ACFTA karena:

- Pertama, China berharap melalui peningkatan hubungan kerjasama ekonomi ACFTA, China dapat lebih leluasa mendapatkan bahan-bahan mentah dan sumber energi.
- Kedua, kerjasama yang dibangun merupakan upaya China dalam mengeser dominasi ekonomi Amerika dan Jepang di Asia Tenggara.
- Ketiga, menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari wilayah pengaruh China.

E. Metode Penelitian

1. Unit Analisa

Melihat dari objek penelitian yang di analisa oleh penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini berupa “meningkatkan perekonomian China melalui pembentukan kerjasama ACFTA”.

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif. Dengan penelitian ini dapat dibangun analisa

yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan bersifat kualitatif dengan telaah pustaka (library research) yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Analisis

Cara analisis untuk menganalisa penelitian ini, penulis melihat dari sisi tujuan penelitian yang bersifat eksplanatif (menjelaskan) dimana mengaitkan hubungan objek penelitian dilihat dari pendekatan sejarah berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai langkah untuk menghindari meluasnya pembahasan atas objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian menjadi terarah, jelas dan spesifik.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan dalam penelitiannya dari tahun 2004 hingga 2012 yaitu pada upaya pemerintah China meningkatkan perekonomian melalui pembentukan kerjasama ACFTA.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah perkembangan perekonomian China, faktor-faktor internal dan eksternal dalam perkembangan perekonomian China.

BAB III : Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang awal sejarah, proses pembentukan kerjasama ACFTA hingga berlangsungnya kerjasama ACFTA.

BAB IV : Dalam bab ini penulis menjelaskan kepentingan China dalam ACFTA dengan menganalisa dari dua variable subjek dan objek penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mengacu kepada hipotesa upaya yang didapat China dengan adanya kerjasama ACFTA 2004-2012.

BAB V : Pada bab ini berisi Penutup terdiri dari kesimpulan mengacu kepada ringkasan keseluruhan tentang penelitian yang telah

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan saran atas hasil penelitian sesuai dengan hasil analisa data yang dilakukan.